



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA



Diskominfo
KABUPATEN PURWAKARTA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024 - 2026

TAHUN ANGGARAN
2023

**LEMBAR VERIFIKASI
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026**

NAMA PD : DISKOMINFO

| NO | URAIAN | HASIL VERIFIKASI | |
|----|---|------------------------------|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB VIII PENUTUP</p> | ✓ | |
| 2 | <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.</p> <p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p> <p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.</p> <p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p> | ✓ ✓ ✓ ✓ | |
| 3 | <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.</p> | ✓ | |

| NO | URAIAN | HASIL VERIFIKASI | |
|----|---|------------------|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</p> | ✓ | |
| | <p>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.</p> | ✓ | |
| | <p>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.</p> | ✓ | |
| | <p>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.</p> <p>Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</p> | ✓ | |
| 4 | <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikator pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p> | ✓ | |
| | <p>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p> | ✓ | |
| | <p>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-</p> | ✓ | |

| NO | URAIAN | HASIL VERIFIKASI | |
|----|---|------------------|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. | | |
| | <p>3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.</p> | ✓ | |
| | <p>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.</p> | ✓ | |
| | <p>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</p> <p>Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.</p> <p>Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana</p> | ✓ | |
| 5 | <p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.</p> | ✓ | |
| 6 | <p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.</p> | ✓ | |
| 7 | <p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.</p> | ✓ | |
| 8 | <p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD, Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD/RPD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.</p> | ✓ | |

| NO | URAIAN | HASIL VERIFIKASI | |
|----|--|------------------|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | BAB VIII PENUTUP Berisikan uraian penutup | ✓ | |
| 10 | KESESUAIAN DENGAN RPJMD/RPD Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program Renstra PD dengan RPJMD/RPD | | |

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....
- fubaris dan jara

VERIFIKATOR,

[Signature]
 (.....)
 AGUS KURNIAWAN
 NIP. 197408041995031001

PURWAKARTA,
 KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

[Signature]
 Siti Katariah
 (.....)
 NIP. 198111212008012008

MENGETAHUI,
 KEPALA BIDANG.....

[Signature]
 (.....)
 H. HERMAWAN, SH, M.SI
 NIP. 196601191990101002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111, Telp. (0264) 200036/200038/200039

Faks. (0264) 200037 e-mail : diskominfo_@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.03.03/318-Sekre/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagai pedoman untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- a) BAB I Pendahuluan;
 - b) BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c) BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d) BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e) BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f) BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - g) BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h) BAB VIII Penutup.

- KETIGA : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, merupakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta

Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA

The image shows a circular official stamp of the Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. The stamp contains the text "DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA" and "KABUPATEN PURWAKARTA". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

RUDI HARTONO, S.A.P, M.A.P

NIP. 19701023 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta didasarkan pada hasil pembahasan perencanaan strategis dari masing-masing Bidang dan LPPL Radio yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Tujuan renstra ini adalah untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sebagai dokumen perencanaan, renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta harus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya dimulai sejak Tahun 2024 sampai dengan 2026. Diharapkan agar seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dapat secara konsisten melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang pada Renstra ini. Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta lebih terarah.

Purwakarta, 28 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.A.P, M.M.
NIP. 19701023 199203 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | |
| BAB I..... | 1 |
| Pendahuluan..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika..... | 7 |
| BAB II..... | 9 |
| Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... | 9 |
| A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 9 |
| 2.1.2 Perlengkapan..... | 21 |
| Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... | 23 |
| BAB III | |
| Permasalahan dan Isu-isu Strategis Diskominfo..... | 43 |
| Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 43 |
| Aspek Pelayanan Umum..... | 45 |
| 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra Diskominfo Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026..... | 48 |
| BAB IV..... | 52 |
| Tujuan dan Sasaran..... | 52 |
| BAB V..... | 55 |
| Strategi dan Arah Kebijakan..... | 55 |
| BAB VI..... | 57 |
| Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan..... | 57 |
| 6.1 Progam..... | 57 |
| BAB VII..... | 66 |
| Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | 66 |
| BAB VIII | |
| Penutup..... | 72 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi, Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
- 29) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis guna mewujudkan visi dan misi yang

tercantum dalam dokumen RPJPD. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini;

Adapun tujuan disusunnya Renstra ini sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah; Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 3 (Tiga) tahun; Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat daerah; Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah; Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/stakeholder perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan; Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

6.2 Kegiatan

6.3 Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang penekanan kinerja penyelenggaraan bidang urusan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 3 (Tiga) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- b. Telekomunikasi dan informatika, yang terdiri atas :
 1. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan

2. pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (e-government).
- c. persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah, yang terdiri atas :
 1. Penyediaan Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 2. Penguatan Sistem Statistik Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maka Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis dan rencana kerja memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- d. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
- e. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/ pihak yang terkait; dan
- g. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris

mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan pada lingkup sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;

- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya. Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- e. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian keuangan; dan

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas Pokok membantu kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. mengkoordinasikan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. mengoordinasikan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media;
- g. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan/atau pimpinan daerah;
- k. melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi strategis sebagai bahan publikasi pemerintah daerah;
- l. menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Telekomunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai perincian tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Telekomunikasi dan Informatika;
- c. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. merumuskan penatalaksanaan, pembinaan dan pengawasan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. merumuskan perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan layanan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan infrastruktur telekomunikasi;
- g. merumuskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi;
- i. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;
- j. merumuskan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- k. merumuskan kebijakan pengembangan aplikasi dan tatakelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- l. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas (smart city);

- m. merumuskan pengembangan dan pengelolaan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- n. menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan aplikasi di Perangkat Daerah Kabupaten;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Telekomunikasi dan Informatika; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan penyediaan layanan keamanan informasi;
- g. merumuskan dan mengoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugasnya.

Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Statistik. Kepala Bidang Statistik mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi dan kegiatan di Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Statistik;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Statistik;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data statistik sektoral;
- e. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- f. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan dalam pembangunan metadata statistik sektoral;
- g. Mengoordinasikan kebijakan dalam pengelolaan informasi geospasial;
- h. Merumuskan perencanaan, pembangunan,
- i. pengelolaan dan pengembangan infrastruktur data statistik sektoral;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Statistik;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai bidang tugasnya.

UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Tata kelola data dan informasi yang berhubungan dengan Radio;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio mempunyai perincian tugas :
- f. menyusun rencana kerja UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengelola Radio;
- h. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya ;
- i. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi administrasi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan program UPTD Radio;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian UPTD Radio;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di lingkup UPTD;
- c. memfasilitasi kegiatan teknis operasional pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan UPTD yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian dan usulan penghapusan barang;
- e. menyusun rencana usulan pengadaan barang/jasa dan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan UPTD;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
- g. menyusun rencana usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis UPTD;
- h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan literatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Analisa kebutuhan jenis, jenjang dan jumlah personil Jabatan Fungsional yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas, dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Sumber Daya Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta didukung oleh Sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset) dan sarana pendukung lainnya Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023. Komposisi

pegawai berdasarkan status Kepegawaian untuk mengimplementasikan tugas, pokok dan fungsi dengan jumlah ASN sebanyak 42 Orang dan Non ASN sebanyak 126 Orang. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Status Kepegawaian

| No. | Status Pegawai | Jumlah Pegawai | |
|-----|---|----------------|------------|
| | | ASN | NON ASN |
| 1. | Sekretariat | 13 | 11 |
| 2. | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 5 | 62 |
| 3. | Bidang Telekomunikasi dan Informatika | 8 | 15 |
| 4. | Bidang Keamanan Informasi dan Persandian | 9 | 9 |
| 5. | Bidang Statistik | 4 | 11 |
| 6. | UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio | 3 | 18 |
| | Jumlah | 42 | 126 |

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu pendidikan S2 sebanyak 24%, S1 (tingkat Sarjana) sebanyak 38%, sedangkan tingkat pendidikan D3 sebanyak 7%, pendidikan setingkat SMA sebanyak 29% dan untuk pendidikan setingkat SMP sebanyak 2% (lihat tabel 2.2). Secara Kualitas dan kuantitas serta profesionalitas kondisi tersebut belum mencukupi untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta secara optimal.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS (Orang) | Prosentase |
|-----|--------------------|-------------|------------|
| 1. | Pasca Sarjana | 10 | 24 % |
| 2. | Sarjana | 16 | 38 % |
| 3. | Diploma III | 3 | 7 % |
| 4. | SLTA/Sederajat | 12 | 29 % |
| 5. | SLTP/Sederajat | 1 | 2 % |
| 6. | SD | 0 | 0 |
| | Jumlah | 42 | |

Komposisi Pegawai Diskominfo berdasarkan jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Eselon II, III dan IV sebanyak 10 orang, jabatan fungsional sebanyak 9 Orang dan untuk jabatan staf sebanyak 23 orang. Adapun komposisi pegawai Diskominfo Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan

| No. | Jumlah/Eselon | Jumlah | Golongan | | | | Ket |
|-----|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----|
| | | | I | II | III | IV | |
| 1. | Struktural | | | | | | |
| | Eselon I | - | | | | - | |
| | Eselon II | 1 | - | - | - | 1 | |
| | Eselon III | 5 | - | - | - | 5 | |
| | Eselon IV | 4 | - | - | 3 | 1 | |
| 2. | Kepegawaian | | | | | | |
| 3. | JFT | 9 | - | 1 | 8 | - | |
| 4. | Staf | 23 | - | 12 | 11 | - | |
| 5. | PTT | 2 | | | | | |
| | Jumlah | 44 | - | 13 | 22 | 7 | |

Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang laki-laki atau 63,04% dan perempuan 14 orang atau 36,95% sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Prosentase |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1. | Laki-laki | 27 | 64,29 % |
| 2. | Perempuan | 15 | 35,71% |
| | Jumlah | 42 | |

Komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan terdiri dari Golongan IV sebesar 14%, Golongan III sebesar 54% dan Golongan II sebesar 30%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai menurut Golongan

| No. | Jenis Golongan | Jumlah | Prosentase |
|-----|----------------|-----------|------------|
| 1 | Golongan IV c | - | - |
| | Golongan IV b | 1 | 2 % |
| | Golongan IV a | 5 | 12 % |
| 2 | Golongan III d | 9 | 21 % |
| | Golongan III c | 3 | 7 % |
| | Golongan III b | 5 | 12 % |
| | Golongan III a | 6 | 14 % |
| 3 | Golongan II d | 6 | 14 % |
| | Golongan II c | 5 | 12 % |
| | Golongan II b | 1 | 2 % |
| | Golongan II a | 1 | 2 % |
| | Jumlah | 42 | |

2.1.2. Perlengkapan

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dilengkapi fasilitas-fasilitas atau ketersediaan sarana dan prasarana kantor yaitu dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Komposisi Perlengkapan Diskominfo

| NO | NAMA PERLENGKAPAN KANTOR | JUMLAH |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| | | (Buah/Unit) |
| 1. | AC Split | 2 |
| 2. | Acces Point | 2 |
| 3. | Alat Penghancur Kertas | 3 |
| 4. | Alat Vidio Studio Lainnya | 2 |
| 5. | Bracket Standing Peralatan | 1 |
| 6. | Cable | 1 |
| 7. | Camera Conference | 1 |
| 8. | Camera Digital | 3 |
| 9. | Camera Vidio | 2 |
| 10. | Capture Card | 2 |
| 11. | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 1 |
| 12. | Dispenser | 2 |
| 13. | Drone | 1 |

| NO | NAMA PERLENGKAPAN KANTOR | JUMLAH |
|---------------|---|-------------|
| | | (Buah/Unit) |
| 14. | External Portable Hardisk | 5 |
| 15. | Genset | 1 |
| 16. | Head Set | 2 |
| 17. | Kompore Gas (Alat Dapur) | 2 |
| 18. | Kontainer | 2 |
| 19. | Lampu Blitz Camera | 4 |
| 20. | Laptop | 7 |
| 21. | Lemari ES | 1 |
| 22. | Lemari Kaca | 1 |
| 23. | Lensa Camera | 1 |
| 24. | Lighting Head Body | 4 |
| 25. | Memory Card (Peralatan Studio Dan Film) | 3 |
| 26. | Microphone | 2 |
| 27. | Microphone Stand | 2 |
| 28. | Microphone/Wireless Mic | 4 |
| 29. | Mixer PVC | 1 |
| 30. | Modem | 1 |
| 31. | Monitor | 2 |
| 32. | Monopod | 2 |
| 33. | PC Unit | 11 |
| 34. | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 6 |
| 35. | RAM / Memory (Peralatan Personal Komputer) | 2 |
| 36. | Rauter | 4 |
| 37. | Recording Workstation | 2 |
| 38. | Splitter | 3 |
| 39. | Storage Modul Disk | 3 |
| 40. | Switch | 1 |
| 41. | Switch | 2 |
| 42. | Tablet PC | 2 |
| 43. | Tas Kamera | 1 |
| 44. | Tas kamera | 1 |
| 45. | Telephone Mobile | 7 |
| 46. | Tripod Camera | 6 |
| 47. | Uninterrupted Power Supply UPS (Peralatan Komputer Lainnya) | 2 |
| JUMLAH | | 261 |

k. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada table 2.4. yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|------|------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|------------------------------|-------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Yang di Dokumentasikan | | | | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Layanan Informasi Publik | | | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Layanan Acara Keprotokolan Pemerintah Daerah | | | | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Telematika | | | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Informasi, Pos dan Telekomunikasi | | | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| Capaian SAKIP Perangkat Daerah | | | | - | - | BB | BB | BB | - | - | BB | BB | - | | | BB | BB | - |
| Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 93,53 | - | 90,63 | 0,00 | 90,00 | 93,53 | - |
| Persentase Media Informasi Yang Dimanfaatkan | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 88,30 | 99,72 | - | 99,72 | 0,00 | 88,30 | 99,72 | - |
| Persentase Publikasi Program Pembangunan Daerah | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 97,81 | - | 97,81 | 0,00 | 90,00 | 97,81 | - |
| Persentase Kegiatan Pemerintahan Daerah Yang Didokumentasikan | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 92,40 | 98,80 | - | 98,80 | 0,00 | 92,40 | 98,80 | - |

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Persentase Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,90 | 82,30 | - | 82,30 | 0,00 | 98,90 | 82,30 | - |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,40 | 98,50 | - | 98,50 | 0,00 | 98,40 | 98,50 | - |
| Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Informatika | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 97,58 | - | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 97,58 | - |
| Persentase Ketersediaan Dokumen Master Plan Infrastruktur Smart City | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 95,50 | - | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 95,50 | - |
| Tingkat Standarisasi Infrastruktur Informatika di Instansi Pemerintah dan Ruang Publik | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 95,60 | - | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 95,60 | - |
| Tingkat Keamanan Jaringan Teknologi Informasi | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 98,40 | - | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 98,40 | - |
| Persentase Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Yang Dikembangkan | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | - |
| Persentase Aplikasi SPBE Yang Sudah Terintegrasi | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | - |
| Persentase Aplikasi SPBE Yang Dimanfaatkan Masyarakat Umum | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 85,50 | 35,36 | - | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 35,36 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Data Persandian dan Statistik Yang Disusun | | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisa Statistik Sektoral dan Spasial Yang Dihasilkan | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sektoral Daerah | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 99,56 | - | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 99,56 | - |
| Persentase Dokumen Hasil Pengolahan dan Analisa Statistik Sektoral dan Spasial Yang | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 82,50 | - | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 82,50 | - |

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Dihasilkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Infomasi (PP) | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| Tingkat Kesiapan Penilaian/ Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi (D) | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 99,70 | - | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 99,70 | - |
| Tingkat Kesiapan Penerapan Standar Prosentase Keamanan Informasi (PR) | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 99,70 | - | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 99,70 | - |
| Tingkat Kesiapan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi (PP) | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 99,80 | - | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 99,80 | - |

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 964,725,000 | | | | | 562,154,941 | | | | | 58.27 | | | | | 964,725,000 | 11.65 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 5,000,000 | | | | | 1,320,000 | | | | | 26.40 | | | | | 5,000,000 | 5.28 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 220,325,000 | | | | | 28,316,495 | | | | | 12.85 | | | | | 220,325,000 | 2.57 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 25,000,000 | | | | | 5,486,300 | | | | | 21.95 | | | | | 25,000,000 | 4.39 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | 58,500,000 | | | | | 48,000,000 | | | | | 82.05 | | | | | 58,500,000 | 16.41 |
| Penyediaan alat tulis kantor | 125,000,000 | | | | | 122,250,000 | | | | | 97.80 | | | | | 125,000,000 | 19.56 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 75,000,000 | | | | | 60,736,162 | | | | | 80.98 | | | | | 75,000,000 | 16.20 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 50,000,000 | 20.00 |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | 60,000,000 | | | | | 50,205,000 | | | | | 83.68 | | | | | 60,000,000 | 16.74 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 25,000,000 | | | | | 2,200,000 | | | | | 8.80 | | | | | 25,000,000 | 1.76 |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 5,000,000 | | | | | 1,320,000 | | | | | 26.40 | | | | | 5,000,000 | 5.28 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 220,325,000 | | | | | 28,316,495 | | | | | 12.85 | | | | | 220,325,000 | 2.57 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 25,000,000 | | | | | 5,486,300 | | | | | 21.95 | | | | | 25,000,000 | 4.39 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 175,000,000 | | | | | 50,740,984 | | | | | 28.99 | | | | | 175,000,000 | 5.80 |
| Penyediaan Jasa Tenaga PTT | 47,400,000 | | | | | 47,400,000 | | | | | 100.00 | | | | | 47,400,000 | 20.00 |
| Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam | 58,500,000 | | | | | 55,500,000 | | | | | 94.87 | | | | | 58,500,000 | 18.97 |
| Festival Purwakarta Istimewa | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 40,000,000 | 20.00 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 175,000,000 | | | | | 50,740,984 | | | | | 28.99 | | | | | 175,000,000 | 5.80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,160,000,000 | 0 | | | | 1,117,220,100 | | | | | 96.31 | | | | | 580,000,000 | 19.26 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 250,000,000 | | | | | 248,040,000 | | | | | 99.22 | | | | | 250,000,000 | 19.84 |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | 200,000,000 | | | | | 198,976,100 | | | | | 99.49 | | | | | 200,000,000 | 19.90 |
| Pengadaan mebeleur | 75,000,000 | | | | | 74,570,000 | | | | | 99.43 | | | | | 75,000,000 | 19.89 |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 125,000,000 | | | | | 123,601,000 | | | | | 98.88 | | | | | 125,000,000 | 19.78 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 50,000,000 | | | | | 49,500,000 | | | | | 99.00 | | | | | 50,000,000 | 19.80 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 200,000,000 | | | | | 163,893,000 | | | | | 81.95 | | | | | 200,000,000 | 16.39 |
| Pengadaan Jasa Sewa Gedung Kantor | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 50,000,000 | 20.00 |
| Penataan Arsip Diskominfo | 100,000,000 | | | | | 99,730,000 | | | | | 99.73 | | | | | 100,000,000 | 19.95 |
| Belanja Sewa Pot Bunga | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Keuangan | 100,000,000 | | | | | 98,910,000 | | | | | 98.91 | | | | | 100,000,000 | 19.78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 80,000,000 | | | | | 74,120,000 | | | | | 92.65 | | | | | 80,000,000 | 18.53 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 25,000,000 | | | | | 20,670,000 | | | | | 82.68 | | | | | 25,000,000 | 16.54 |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Penyusunan Rencana Kerja | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Penyusunan Rencana Strategis | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Penguatan Penyelenggaraan SPIP | 15,000,000 | | | | | 13,450,000 | | | | | 89.67 | | | | | 15,000,000 | 17.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 15,763,550,000 | | | | | 14,626,868,095 | | | | | 92.79 | | | | | 15,763,550,000 | 18.56 |
| Pengadaan alat studio dan komunikasi | 150,000,000 | | | | | 136,199,886 | | | | | 90.80 | | | | | 150,000,000 | 18.16 |
| Peningkatan Kapabilitas Dokumentasi | 25,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 25,000,000 | 0.00 |
| Dokumentasi Kegiatan Pemkab Purwakarta | 425,000,000 | | | | | 424,200,000 | | | | | 99.81 | | | | | 425,000,000 | 19.96 |
| Pemeliharaan Sarana Dokumentasi | 100,000,000 | | | | | 97,925,300 | | | | | 97.93 | | | | | 100,000,000 | 19.59 |
| Produksi Film Dokumenter Pembangunan Daerah | 150,000,000 | | | | | 134,667,800 | | | | | 89.78 | | | | | 150,000,000 | 17.96 |
| Pengadaan Sarana Dokumentasi | 250,000,000 | | | | | 244,104,000 | | | | | 97.64 | | | | | 250,000,000 | 19.53 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Penataan Dokumentasi Pembangunan Daerah | 25,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 25,000,000 | 0.00 |
| Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah | 8,850,000,000 | | | | | 8,515,165,728 | | | | | 96.22 | | | | | 8,850,000,000 | 19.24 |
| Peningkatan Kapasitas Jurnalistik | 100,000,000 | | | | | 96,524,000 | | | | | 96.52 | | | | | 100,000,000 | 19.30 |
| Sosialisasi Aplikasi Ogan Lopian | 100,000,000 | | | | | 93,508,000 | | | | | 93.51 | | | | | 100,000,000 | 18.70 |
| Pelatihan Jurnalistik | 100,000,000 | | | | | 77,850,000 | | | | | 77.85 | | | | | 100,000,000 | 15.57 |
| Pendayagunaan Media Cetak | 150,000,000 | | | | | 128,658,000 | | | | | 85.77 | | | | | 150,000,000 | 17.15 |
| Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi | 345,000,000 | | | | | 275,360,495 | | | | | 79.81 | | | | | 345,000,000 | 15.96 |
| Pengadaan Sarana PPIID | 100,000,000 | | | | | 96,750,000 | | | | | 96.75 | | | | | 100,000,000 | 19.35 |
| Pemeliharaan Sarana PPIID | 75,000,000 | | | | | 75,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 75,000,000 | 20.00 |
| Peningkatan Kapasitas PPIID | 75,000,000 | | | | | 73,100,000 | | | | | 97.47 | | | | | 75,000,000 | 19.49 |
| Penerbitan, Penyiaran Produksi dan Penyangangan Khusus Kegiatan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2019 | 100,000,000 | | | | | 100,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 100,000,000 | 20.00 |
| Kegiatan Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 75,000,000 | | | | | 74,800,000 | | | | | 99.73 | | | | | 75,000,000 | 19.95 |
| Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 75,000,000 | | | | | 73,800,000 | | | | | 98.40 | | | | | 75,000,000 | 19.68 |
| Peningkatan Kinerja Radio | 759,000,000 | | | | | 680,290,000 | | | | | 89.63 | | | | | 759,000,000 | 17.93 |
| Pengurusan Perijinan Radio | 50,000,000 | | | | | 12,649,886 | | | | | 25.30 | | | | | 50,000,000 | 5.06 |
| Peningkatan Kinerja GPTV | 1,071,000,000 | | | | | 843,050,000 | | | | | 78.72 | | | | | 1,071,000,000 | 15.74 |
| Pengadaan Komputer Editing | 200,000,000 | | | | | 195,653,000 | | | | | 97.83 | | | | | 200,000,000 | 19.57 |
| Pengadaan Alat Cetak Foto | 48,550,000 | | | | | 48,543,000 | | | | | 99.99 | | | | | 48,550,000 | 20.00 |
| Pengadaan Kamera Foto dan Video | 400,000,000 | | | | | 372,954,200 | | | | | 93.24 | | | | | 400,000,000 | 18.65 |
| Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta | 50,000,000 | | | | | 47,000,000 | | | | | 94.00 | | | | | 50,000,000 | 18.80 |
| Pelatihan Desain Grafis dan Fotografer | 100,000,000 | | | | | 54,209,000 | | | | | 54.21 | | | | | 100,000,000 | 10.84 |
| Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah | 315,000,000 | | | | | 311,400,000 | | | | | 98.86 | | | | | 315,000,000 | 19.77 |
| Pengelolaan Ogan Lopian | 575,000,000 | | | | | 535,000,000 | | | | | 93.04 | | | | | 575,000,000 | 18.61 |
| Peningkatan Kinerja Team Media Sosial | 200,000,000 | | | | | 188,800,000 | | | | | 94.40 | | | | | 200,000,000 | 18.88 |
| Sosialisasi Penggunaan Media Sosial | 100,000,000 | | | | | 95,642,000 | | | | | 95.64 | | | | | 100,000,000 | 19.13 |
| Sosialisasi Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik | 100,000,000 | | | | | 85,694,800 | | | | | 85.69 | | | | | 100,000,000 | 17.14 |
| Sosialisasi Call Center | 100,000,000 | | | | | 94,508,000 | | | | | 94.51 | | | | | 100,000,000 | 18.90 |
| Sosialisasi Uji Kompetensi Wartawan | 100,000,000 | | | | | 98,810,000 | | | | | 98.81 | | | | | 100,000,000 | 19.76 |
| Pelatihan Analisis Media | 75,000,000 | | | | | 72,800,000 | | | | | 97.07 | | | | | 75,000,000 | 19.41 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Sosialisasi Kegiatan Hari-Hari Tertentu | 75,000,000 | | | | | 75,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 75,000,000 | 20.00 |
| Pemeliharaan Gedung Radio | 100,000,000 | | | | | 97,251,000 | | | | | 97.25 | | | | | 100,000,000 | 19.45 |
| Pengadaan Lensa Kamera | 75,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 75,000,000 | 0.00 |
| Program Persandian dan Statistik | 1,380,000,000 | | | | | 1,348,042,000 | | | | | 97.68 | | | | | 1,380,000,000 | 19.54 |
| Pengadaan Reapeter Radio Komunikasi VHF | 175,000,000 | | | | | 171,500,000 | | | | | 98.00 | | | | | 175,000,000 | 19.60 |
| Pengadaan Handy Talki (HT) | 75,000,000 | | | | | 72,900,000 | | | | | 97.20 | | | | | 75,000,000 | 19.44 |
| Pengadaan Kertas Fax | 75,000,000 | | | | | 72,820,000 | | | | | 97.09 | | | | | 75,000,000 | 19.42 |
| Peningkatan Kinerja Persandian | 195,000,000 | | | | | 191,925,000 | | | | | 98.42 | | | | | 195,000,000 | 19.68 |
| Pemeliharaan Sarana Komunikasi | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 50,000,000 | 20.00 |
| Pengembangan Database Statistik | 100,000,000 | | | | | 95,550,000 | | | | | 95.55 | | | | | 100,000,000 | 19.11 |
| Peningkatan Kinerja Pengolahan Data | 295,000,000 | | | | | 288,867,000 | | | | | 97.92 | | | | | 295,000,000 | 19.58 |
| Penyusunan Data Statistik | 25,000,000 | | | | | 19,480,000 | | | | | 77.92 | | | | | 25,000,000 | 15.58 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Call Centre 112 | 190,000,000 | | | | | 187,000,000 | | | | | 98.42 | | | | | 190,000,000 | 19.68 |
| Call Centre Kabupaten Purwakarta | 200,000,000 | | | | | 198,000,000 | | | | | 99.00 | | | | | 200,000,000 | 19.80 |
| Program Pengembangan Aplikasi Telematika | 1,710,000,000 | | | | | 1,288,090,970 | | | | | 75.33 | | | | | 1,710,000,000 | 15.07 |
| Peningkatan Kapasitas Pengelola Sistem Informasi | 100,000,000 | | | | | 81,203,200 | | | | | 81.20 | | | | | 100,000,000 | 16.24 |
| Peningkatan Kapasitas Bidang Aplikasi Informatika | 100,000,000 | | | | | 99,450,000 | | | | | 99.45 | | | | | 100,000,000 | 19.89 |
| Interoperabilitas Aplikasi Pemerintah | 80,000,000 | | | | | 61,111,000 | | | | | 76.39 | | | | | 80,000,000 | 15.28 |
| Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id | 100,000,000 | | | | | 99,750,000 | | | | | 99.75 | | | | | 100,000,000 | 19.95 |
| Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | 250,000,000 | | | | | 248,557,400 | | | | | 99.42 | | | | | 250,000,000 | 19.88 |
| Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah | 250,000,000 | | | | | 250,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 250,000,000 | 20.00 |
| Pendayagunaan Operator TIK | 50,000,000 | | | | | 49,730,000 | | | | | 99.46 | | | | | 50,000,000 | 19.89 |
| Kompetisi Aplikasi Berbasis Web | 50,000,000 | | | | | 45,090,000 | | | | | 90.18 | | | | | 50,000,000 | 18.04 |
| Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi | 75,000,000 | | | | | 70,553,770 | | | | | 94.07 | | | | | 75,000,000 | 18.81 |
| Peningkatan Sarana Pembuatan Konten Web | 50,000,000 | | | | | 49,713,200 | | | | | 99.43 | | | | | 50,000,000 | 19.89 |
| Monitoring Aplikasi Pemerintah | 45,000,000 | | | | | 43,830,000 | | | | | 97.40 | | | | | 45,000,000 | 19.48 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Perpanjangan License Google Map | 360,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | | 360,000,000 | 0.00 |
| Pengembangan Aplikasi Ogan Lopian | 150,000,000 | | | | | 149,102,400 | | | | | 99.40 | | | | | 150,000,000 | 19.88 |
| Kajian Pembuatan Aplikasi Penerimaan Pendapatan Daerah | 50,000,000 | | | | | 40,000,000 | | | | | 80.00 | | | | | 50,000,000 | 16.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Teknologi Informasi Pos dan Telekomunikasi | 8,952,500,000 | | | | | 8,154,204,447 | | | | | 91.08 | | | | | 8,952,500,000 | 18.22 |
| Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center | 50,000,000 | | | | | 46,815,500 | | | | | 93.63 | | | | | 50,000,000 | 18.73 |
| Penyusunan DED Ducting Bersama Jaringan Pemda Purwakarta | 150,000,000 | | | | | 145,885,800 | | | | | 97.26 | | | | | 150,000,000 | 19.45 |
| Sewa Bandwith Internet | 2,000,000,000 | | | | | 1,995,395,000 | | | | | 99.77 | | | | | 2,000,000,000 | 19.95 |
| Sewa Jaringan Fiber Optic (FO) OPD | 1,500,000,000 | | | | | 1,485,466,750 | | | | | 99.03 | | | | | 1,500,000,000 | 19.81 |
| Stabilisasi Jaringan | 950,000,000 | | | | | 866,803,450 | | | | | 91.24 | | | | | 950,000,000 | 18.25 |
| Pengembangan SDM | 100,000,000 | | | | | 99,129,600 | | | | | 99.13 | | | | | 100,000,000 | 19.83 |
| Monev Pengendalian Menara | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 | | | | | 100.00 | | | | | 25,000,000 | 20.00 |
| Kajian Pentanan Menara Microseluler | 25,000,000 | | | | | 23,469,000 | | | | | 93.88 | | | | | 25,000,000 | 18.78 |
| Kajian Standarisasi Platfrom Keamanan dan Sistem Informasi | 25,000,000 | | | | | 23,496,500 | | | | | 93.99 | | | | | 25,000,000 | 18.80 |
| Peningkatan Kinerja Bidang Teknologi dan Informatika | 250,000,000 | | | | | 142,309,800 | | | | | 56.92 | | | | | 250,000,000 | 11.38 |
| Pengadaan Jaringan Untuk Area Publik | 200,000,000 | | | | | 195,649,850 | | | | | 97.82 | | | | | 200,000,000 | 19.56 |
| Pemeliharaan Menara | 50,000,000 | | | | | 45,815,000 | | | | | 91.63 | | | | | 50,000,000 | 18.33 |
| Pengadaan Fasilitas Layanan Bergerak Diskominfo Kabupaten Purwakarta | 500,000,000 | | | | | 434,863,960 | | | | | 86.97 | | | | | 500,000,000 | 17.39 |
| Pengembangan Desa Cerdas Internet | 750,000,000 | | | | | 746,354,000 | | | | | 99.51 | | | | | 750,000,000 | 19.90 |
| Penyusunan SOP Pelayanan Diskominfo | 50,000,000 | | | | | 42,095,000 | | | | | 84.19 | | | | | 50,000,000 | 16.84 |
| Pengawasan Jaringan IT | 50,000,000 | | | | | 23,980,000 | | | | | 47.96 | | | | | 50,000,000 | 9.59 |
| Pengadaan Video Confrence | 1,000,000,000 | | | | | 977,426,337 | | | | | 97.74 | | | | | 1,000,000,000 | 19.55 |
| Pengembangan CCTV Purwakarta | 250,000,000 | | | | | 246,579,500 | | | | | 98.63 | | | | | 250,000,000 | 19.73 |
| Perpanjangan License Perangkat IT Security | 355,000,000 | | | | | 4,200,000 | | | | | 1.18 | | | | | 355,000,000 | 0.24 |
| Sewa Bandwith Ogan Lopian | 637,500,000 | | | | | 582,469,400 | | | | | 91.37 | | | | | 637,500,000 | 18.27 |
| DED Pembangunan Dashboard Executive Centre | 35,000,000 | | | | | 1,000,000 | | | | | 2.86 | | | | | 35,000,000 | 0.57 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran | | 1,937,332,000 | | | | | 1,746,967,184 | | | | | 90.17 | | | | 1,937,332,000 | 18.03 |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 54,852,000 | | | | | 25,758,784 | | | | | 46.96 | | | | 54,852,000 | 9.39 |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | 30,000,000 | | | | | 7,420,000 | | | | | 24.73 | | | | 30,000,000 | 4.95 |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor | | 62,100,000 | | | | | 62,100,000 | | | | | 100.00 | | | | 62,100,000 | 20.00 |
| Penyediaan alat tulis kantor | | 116,800,000 | | | | | 116,795,000 | | | | | 100.00 | | | | 116,800,000 | 20.00 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | 120,000,000 | | | | | 114,900,000 | | | | | 95.75 | | | | 120,000,000 | 19.15 |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | 25,000,000 | | | | | 24,965,000 | | | | | 99.86 | | | | 25,000,000 | 19.97 |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | | 76,820,000 | | | | | 75,670,000 | | | | | 98.50 | | | | 76,820,000 | 19.70 |
| Penyediaan makanan dan minuman | | 35,000,000 | | | | | 24,000,000 | | | | | 68.57 | | | | 35,000,000 | 13.71 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 25,000,000 | | | | | 22,340,000 | | | | | 89.36 | | | | 25,000,000 | 17.87 |
| Penyediaan Jasa Tenaga PTT | | 46,800,000 | | | | | 46,650,000 | | | | | 99.68 | | | | 46,800,000 | 19.94 |
| Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam | | 62,100,000 | | | | | 52,500,000 | | | | | 84.54 | | | | 62,100,000 | 16.91 |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | 215,000,000 | | | | | 201,000,000 | | | | | 93.49 | | | | 215,000,000 | 18.70 |
| Pengadaan mebeleur | | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 10,000,000 | 20.00 |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | 50,000,000 | | | | | 33,523,024 | | | | | 67.05 | | | | 50,000,000 | 13.41 |
| Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | 233,180,000 | | | | | 198,194,000 | | | | | 85.00 | | | | 233,180,000 | 17.00 |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | | 75,000,000 | | | | | 74,468,000 | | | | | 99.29 | | | | 75,000,000 | 19.86 |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | 12,120,000 | | | | | 12,120,000 | | | | | 100.00 | | | | 12,120,000 | 20.00 |
| penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | 20,000,000 | | | | | 19,360,000 | | | | | 96.80 | | | | 20,000,000 | 19.36 |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | 15,000,000 | | | | | 15,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 15,000,000 | 20.00 |
| Penusunan Rencana Kerja | | 15,000,000 | | | | | 15,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 15,000,000 | 20.00 |
| Pengadaan Pakaian Batik | | 100,000,000 | | | | | 99,770,000 | | | | | 99.77 | | | | 100,000,000 | 19.95 |
| Penyusunan LPPD | | 6,060,000 | | | | | 6,060,000 | | | | | 100.00 | | | | 6,060,000 | 20.00 |
| Penyusunan Cas Cading/Tapkin | | 7,500,000 | | | | | 7,500,000 | | | | | 100.00 | | | | 7,500,000 | 20.00 |
| Penguatan penyelenggaraan SPIP | | 15,000,000 | | | | | 14,995,000 | | | | | 99.97 | | | | 15,000,000 | 19.99 |
| Premi Asuransi Pegawai Non PNS | | 324,000,000 | | | | | 283,058,376 | | | | | 87.36 | | | | 324,000,000 | 17.47 |
| Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 10,000,000 | | | | | 8,920,000 | | | | | 89.20 | | | | 10,000,000 | 17.84 |
| Belanja Pakaian Khusus hari-hari Tertentu | | 175,000,000 | | | | | 174,900,000 | | | | | 99.94 | | | | 175,000,000 | 19.99 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | | 9,926,884,000 | | | | | 9,020,348,927 | | | | | 90.87 | | | | 9,926,884,000 | 18.17 |
| Pengadaan Sarana Radio | | 50,000,000 | | | | | 49,511,000 | | | | | 99.02 | | | | 50,000,000 | 19.80 |
| Peningkatan Kinerja Radio | | 700,000,000 | | | | | 626,800,000 | | | | | 89.54 | | | | 700,000,000 | 17.91 |
| Peningkatan Kinerja GPTV | | 1,080,000,000 | | | | | 721,092,000 | | | | | 66.77 | | | | 1,080,000,000 | 13.35 |
| Pengurusan Perijinan Radio | | 50,000,000 | | | | | 9,127,800 | | | | | 18.26 | | | | 50,000,000 | 3.65 |
| Pengadaan alat penunjang pelayanan informasi | | 300,000,000 | | | | | 297,195,000 | | | | | 99.07 | | | | 300,000,000 | 19.81 |
| Media Gathering | | 50,000,000 | | | | | 48,812,500 | | | | | 97.63 | | | | 50,000,000 | 19.53 |
| Liputan Khusus kegiatan kepala daerah | | 150,000,000 | | | | | 144,900,000 | | | | | 96.60 | | | | 150,000,000 | 19.32 |
| Peningkatan SDM penyiar dan Reporter | | 50,000,000 | | | | | 46,117,500 | | | | | 92.24 | | | | 50,000,000 | 18.45 |
| Pengadaan Alat Penunjang Dokumen | | 48,890,000 | | | | | 48,890,000 | | | | | 100.00 | | | | 48,890,000 | 20.00 |
| Pengadaan mesin anjungan layanan Informasi KIOS K | | 75,000,000 | | | | | 72,870,000 | | | | | 97.16 | | | | 75,000,000 | 19.43 |
| Kegiatan dokumentasi gempungan | | 52,449,000 | | | | | 52,449,000 | | | | | 100.00 | | | | 52,449,000 | 20.00 |
| Surevey Indeks Kepuasan Masyarakat | | 25,000,000 | | | | | 23,300,000 | | | | | 93.20 | | | | 25,000,000 | 18.64 |
| Pengadaan Majalah Pemda Purwakarta | | 500,000,000 | | | | | 492,182,500 | | | | | 98.44 | | | | 500,000,000 | 19.69 |
| Pengadaan Peralatan Media Center | | 200,000,000 | | | | | 198,727,500 | | | | | 99.36 | | | | 200,000,000 | 19.87 |
| Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta | | 351,100,000 | | | | | 335,000,000 | | | | | 95.41 | | | | 351,100,000 | 19.08 |
| Pengadaan Sarana Dokumentasi | | 98,475,000 | | | | | 97,740,500 | | | | | 99.25 | | | | 98,475,000 | 19.85 |
| Publikasi Pembangunan Daerah | | 3,800,000,000 | | | | | 3,534,928,727 | | | | | 93.02 | | | | 3,800,000,000 | 18.60 |
| Peningkatan dan pelatihan Kapasitas Jurnalis | | 100,000,000 | | | | | 94,748,500 | | | | | 94.75 | | | | 100,000,000 | 18.95 |
| Pengelolaan Ogan Lopian | | 545,500,000 | | | | | 504,600,000 | | | | | 92.50 | | | | 545,500,000 | 18.50 |
| Pendayagunaan Media Cetak | | 150,000,000 | | | | | 126,925,400 | | | | | 84.62 | | | | 150,000,000 | 16.92 |
| Pengadaan sarana Pemberitaan | | 200,000,000 | | | | | 194,870,000 | | | | | 97.44 | | | | 200,000,000 | 19.49 |
| Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah | | 300,000,000 | | | | | 276,990,000 | | | | | 92.33 | | | | 300,000,000 | 18.47 |
| Pengembangan Tim Media Sosial | | 300,000 | | | | | 300,000 | | | | | 100.00 | | | | 300,000 | 20.00 |
| Peningkatan Kinerja Pelayanan Informasi | | 325,000,000 | | | | | 324,606,000 | | | | | 99.88 | | | | 325,000,000 | 19.98 |
| Pemeliharaan Sarana PPID | | 50,000,000 | | | | | 47,476,000 | | | | | 94.95 | | | | 50,000,000 | 18.99 |
| Peningkatan Kapasitas PPID | | 100,000,000 | | | | | 92,257,000 | | | | | 92.26 | | | | 100,000,000 | 18.45 |
| Penerbitan Kegiatan Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di Media Cetak | | 100,000,000 | | | | | 97,493,000 | | | | | 97.49 | | | | 100,000,000 | 19.50 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------------|------|------|------|---|--------------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Penayangan khusus Hari Jadi Kab.Purwakarta Tahun 2020 di media online | | 100,000,000 | | | | | 97,625,000 | | | | | 97.63 | | | | 100,000,000 | 19.53 |
| Dokumentasi hari jadi Kabupaten Purwakarta | | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 25,000,000 | 20.00 |
| Pengadaan e Magazine | | 100,000,000 | | | | | 94,930,000 | | | | | 94.93 | | | | 100,000,000 | 18.99 |
| Peningkatan media informasi pada Kegiatan hari Tertentu | | 150,000,000 | | | | | 144,520,000 | | | | | 96.35 | | | | 150,000,000 | 19.27 |
| Pengembangan Sistem Informasi PPID | | 100,170,000 | | | | | 98,364,000 | | | | | 98.20 | | | | 100,170,000 | 19.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | | 299,510,000 | | | | | 291,910,000 | | | | | 97.46 | | | | 299,510,000 | 19.49 |
| Updating Data Statistik Sektoral | | 20,460,000 | | | | | 20,460,000 | | | | | 100.00 | | | | 20,460,000 | 20.00 |
| Peningkatan Kinerja Pengolahan Data | | 204,050,000 | | | | | 201,150,000 | | | | | 98.58 | | | | 204,050,000 | 19.72 |
| Pengembangan Database Statistik | | 50,000,000 | | | | | 47,100,000 | | | | | 94.20 | | | | 50,000,000 | 18.84 |
| Penyusunan Data Statistik Sektoral | | 25,000,000 | | | | | 23,200,000 | | | | | 92.80 | | | | 25,000,000 | 18.56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Persandian Daerah | | 438,600,000 | | | | | 435,900,000 | | | | | 99.38 | | | | 438,600,000 | 19.88 |
| Peningkatan Kinerja Persandian | | 213,600,000 | | | | | 213,300,000 | | | | | 99.86 | | | | 213,600,000 | 19.97 |
| Pengadaan Kertas Fax | | 75,000,000 | | | | | 73,100,000 | | | | | 97.47 | | | | 75,000,000 | 19.49 |
| Pemeliharaan Sarana Komunikasi | | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 25,000,000 | 20.00 |
| Pengadaan Alat Komunikasi | | 50,000,000 | | | | | 49,750,000 | | | | | 99.50 | | | | 50,000,000 | 19.90 |
| Pengembangan jaringan Rifier | | 50,000,000 | | | | | 49,750,000 | | | | | 99.50 | | | | 50,000,000 | 19.90 |
| Pemeliharaan Jaringan Rifier | | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 | | | | | 100.00 | | | | 25,000,000 | 20.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Aplikasi Informatika | | 1,146,670,000 | | | | | 1,127,768,000 | | | | | 98.35 | | | | 1,146,670,000 | 19.67 |
| Pendayagunaan Aplikasi Pemerintah | | 267,086,500 | | | | | 260,150,000 | | | | | 97.40 | | | | 267,086,500 | 19.48 |
| Call Centre Kabupaten Purwakarta | | 200,000,000 | | | | | 199,745,000 | | | | | 99.87 | | | | 200,000,000 | 19.97 |
| Pemberdayaan Operator TIK | | 37,125,000 | | | | | 36,875,000 | | | | | 99.33 | | | | 37,125,000 | 19.87 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|---|--------------|--------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Sewa Webhosting www.purwakartakab.go.id | | 100,000,000 | | | | | 99,700,000 | | | | | 99.70 | | | | 100,000,000 | 19.94 |
| Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Berbasis Web | | 525,188,500 | | | | | 523,978,000 | | | | | 99.77 | | | | 525,188,500 | 19.95 |
| Evaluasi Smart City Purwakarta | | 3,750,000 | | | | | 3,500,000 | | | | | 93.33 | | | | 3,750,000 | 18.67 |
| Monitoring Aplikasi Pemerintah | | 13,520,000 | | | | | 3,820,000 | | | | | 28.25 | | | | 13,520,000 | 5.65 |
| Program Pengembangan Teknologi Informatika | | 5,974,870,000 | | | | | 5,735,203,500 | | | | | 95.99 | | | | 5,974,870,000 | 19.20 |
| Pengembangan jaringan Komunikasi Informasi dan Data Center | | 100,000,000 | | | | | 94,000,000 | | | | | 94.00 | | | | 100,000,000 | 18.80 |
| Sewa Bandwith Internet | | 2,735,880,000 | | | | | 2,730,490,000 | | | | | 99.80 | | | | 2,735,880,000 | 19.96 |
| Stabilisasi Jaringan | | 503,200,000 | | | | | 491,209,000 | | | | | 97.62 | | | | 503,200,000 | 19.52 |
| Monev Pengendalian Menara | | 25,500,000 | | | | | 24,940,000 | | | | | 97.80 | | | | 25,500,000 | 19.56 |
| Sewa Satelit Fasilitas Layanan Internet Bergerak Diskominfo Purwakarta | | 227,360,000 | | | | | 178,950,000 | | | | | 78.71 | | | | 227,360,000 | 15.74 |
| Pengembangan Desa Cerdas Internet | | 1,244,700,000 | | | | | 1,237,678,500 | | | | | 99.44 | | | | 1,244,700,000 | 19.89 |
| Pengembangan CCTV Purwakarta | | 320,110,000 | | | | | 312,455,900 | | | | | 97.61 | | | | 320,110,000 | 19.52 |
| Pengembangan Jaringan untuk Area Publik | | 49,500,000 | | | | | 45,002,000 | | | | | 90.91 | | | | 49,500,000 | 18.18 |
| Sewa Bandwith Ogan Lopian | | 630,750,000 | | | | | 582,608,100 | | | | | 92.37 | | | | 630,750,000 | 18.47 |
| Pemeliharaan Server | | 100,000,000 | | | | | 0 | | | | | 0.00 | | | | 100,000,000 | 0.00 |
| Pemeliharaan Menara | | 37,870,000 | | | | | 37,870,000 | | | | | 100.00 | | | | 37,870,000 | 20.00 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | 11,920,526,563 | 11,925,426,563 | | | 5,367,486,917 | 11,100,016,097 | | | | 45.03 | 93.08 | | 11,922,976,563 | 27.62 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 39,985,459 | 22,503,700 | | | 30,257,315 | 22,453,600 | | | | 75.67 | 99.78 | | 31,244,580 | 35.09 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 10,069,475 | 7,501,850 | | | 10,069,475 | 7,481,400 | | | | 100.00 | 99.73 | | 8,785,663 | 39.95 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 10,007,921 | 7,500,500 | | | 10,007,921 | 7,498,800 | | | | 100.00 | 99.98 | | 8,754,211 | 40.00 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 19,908,063 | 7,501,350 | | | 10,179,919 | 7,473,400 | | | | 51.13 | 99.63 | | 13,704,707 | 30.15 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6,540,105,454 | 6,674,188,084 | | | 6,156,728,943 | 6,035,215,531 | | | | 94.14 | 90.43 | | 6,607,146,769 | 36.91 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6,520,188,084 | 6,664,188,084 | | | 6,136,815,393 | 6,025,273,881 | | | | 94.12 | 90.41 | | 6,592,188,084 | 36.91 | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------|----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|------|---|------|--------------|---------------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 19,917,370 | 10,000,000 | | | | 19,913,550 | 9,941,650 | | | | 99.98 | 99.42 | | 14,958,685 | 39.88 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 9,884,087 | 7,500,850 | | | | 9,584,087 | 7,500,850 | | | | 96.96 | 100.00 | | 8,692,469 | 39.39 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 9,884,087 | 7,500,850 | | | | 9,584,087 | 7,500,850 | | | | 96.96 | 100.00 | | 8,692,469 | 39.39 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 0 | 150,000,000 | | | | 0 | 149,850,000 | | | | 0.00 | 99.90 | | 75,000,000 | 19.98 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | - | 150,000,000 | | | | - | 149,850,000 | | | | | 99.90 | | 150,000,000 | 19.98 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 791,895,194 | 731,638,827 | | | | 615,204,922 | 716,750,827 | | | | 77.69 | 97.97 | | 761,767,011 | 35.13 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 100,076,330 | 40,000,000 | | | | 57,123,017 | 39,996,500 | | | | 57.08 | 99.99 | | 70,038,165 | 31.41 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 197,881,798 | 200,000,000 | | | | 197,550,000 | 195,350,000 | | | | 99.83 | 97.68 | | 198,940,899 | 39.50 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 71,969,001 | 82,000,000 | | | | 71,262,608 | 81,892,900 | | | | 99.02 | 99.87 | | 76,984,501 | 39.78 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 252,734,890 | 185,000,000 | | | | 181,952,964 | 179,828,550 | | | | 71.99 | 97.20 | | 218,867,445 | 33.84 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 74,210,175 | 124,638,827 | | | | 61,098,250 | 121,489,600 | | | | 82.33 | 97.47 | | 99,424,501 | 35.96 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 95,023,000 | 100,000,000 | | | | 46,218,083 | 98,193,277 | | | | 48.64 | 98.19 | | 97,511,500 | 29.37 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 665,687,200 | 4,169,575,102 | | | | 473,620,023 | 3,998,257,124 | | | | 71.15 | 95.89 | | 2,417,631,151 | 33.41 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 100.00 | 100.00 | | 2,500,000 | 40.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 149,935,200 | 350,007,200 | | | | 39,926,320 | 252,238,393 | | | | 26.63 | 72.07 | | 249,971,200 | 19.74 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 513,252,000 | 3,817,067,902 | | | | 431,193,703 | 3,743,518,731 | | | | 84.01 | 98.07 | | 2,165,159,951 | 36.42 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 172,751,175 | 170,020,000 | | | | 113,002,990 | 169,988,165 | | | | 65.41 | 99.98 | | 171,385,588 | 33.08 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 87,000,000 | 90,000,000 | | | | 37,560,390 | 89,968,165 | | | | 43.17 | 99.96 | | 88,500,000 | 28.63 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 15,000,000 | 20,000,000 | | | | 5,842,600 | 20,000,000 | | | | 38.95 | 100.00 | | 17,500,000 | 27.79 |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | 70,751,175 | 60,020,000 | | | | 69,600,000 | 60,020,000 | | | | 98.37 | 100.00 | | 65,385,588 | 39.67 |
| Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | | 6,920,045,284 | 5,232,113,500 | | | | 6,704,366,131 | 5,077,563,399 | | | | 96.88 | 97.05 | | 6,076,079,392 | 38.79 |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 6,920,045,284 | 5,232,113,500 | | | | 6,704,366,131 | 5,077,563,399 | | | | 96.88 | 97.05 | | 6,076,079,392 | 38.79 |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | 1,218,728,352 | 255,000,000 | | | | 1,076,228,352 | 254,306,550 | | | | 88.31 | 99.73 | | 736,864,176 | 37.61 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------|--------------------|--------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|------|---|------|--------------|--------------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | 3,602,020,970 | 2,720,000,000 | | | | 3,565,779,354 | 2,694,748,100 | | | | 98.99 | 99.07 | | 3,161,010,485 | 39.61 |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 222,403,000 | 600,000,000 | | | | 205,528,000 | 592,851,100 | | | | 92.41 | 98.81 | | 411,201,500 | 38.24 |
| Pelayanan Informasi Publik | | | 790,904,315 | 226,000,000 | | | | 787,428,500 | 219,872,250 | | | | 99.56 | 97.29 | | 508,452,158 | 39.37 |
| Layanan Hubungan Media | | | 667,824,437 | 600,000,000 | | | | 664,149,437 | 595,040,600 | | | | 99.45 | 99.17 | | 633,912,219 | 39.72 |
| Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | 14,998,685 | 237,500,000 | | | | 6,362,000 | 231,812,049 | | | | 42.42 | 97.61 | | 126,249,343 | 28.00 |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | 249,664,704 | 493,613,500 | | | | 248,727,667 | 488,932,750 | | | | 99.62 | 99.05 | | 371,639,102 | 39.74 |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | 153,500,821 | 100,000,000 | | | | 150,162,821 | 0 | | | | 97.83 | 0.00 | | 126,750,411 | 19.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | 374,591,764 | 427,812,100 | | | | 333,641,764 | 394,476,100 | | | | 89.07 | 92.21 | | 401,201,932 | 36.26 |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 374,591,764 | 427,812,100 | | | | 333,641,764 | 394,476,100 | | | | 89.07 | 92.21 | | 401,201,932 | 36.26 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | 84,998,379 | 79,318,000 | | | | 69,788,379 | 56,362,000 | | | | 82.11 | 71.06 | | 82,158,190 | 30.63 |
| Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | 166,499,704 | 45,000,000 | | | | 160,414,704 | 44,740,000 | | | | 96.35 | 99.42 | | 105,749,852 | 39.15 |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | 48,497,180 | 50,996,250 | | | | 30,387,180 | 41,726,250 | | | | 62.66 | 81.82 | | 49,746,715 | 28.90 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | 0 | 52,499,200 | | | | 0 | 52,449,200 | | | | 0.00 | 99.90 | | 26,249,600 | 19.98 |
| Pengembangan Infrastruktur | | | 74,596,501 | 199,998,650 | | | | 73,051,501 | 199,198,650 | | | | 97.93 | 99.60 | | 137,297,576 | 39.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | 449,173,638 | 461,999,100 | | | | 434,489,638 | 461,104,150 | | | | 96.73 | 99.81 | | 455,586,369 | 39.31 |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 349,258,288 | 357,499,450 | | | | 342,894,288 | 356,754,500 | | | | 98.18 | 99.79 | | 353,378,869 | 39.59 |
| Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 349,258,288 | 357,499,450 | | | | 342,894,288 | 356,754,500 | | | | 98.18 | 99.79 | | 353,378,869 | 39.59 |
| Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 99,915,350 | 104,499,650 | | | | 91,595,350 | 104,349,650 | | | | 91.67 | 99.86 | | 102,207,500 | 38.31 |

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------|------|---|------|--------------|--------------|------|-----------------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 99,915,350 | 104,499,650 | | | | 91,595,350 | 104,349,650 | | | | 91.67 | 99.86 | | 102,207,500 | 38.31 |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | | | 10,430,412,204 | 7,344,950,850 | | | | 10,072,218,550 | 7,065,771,001 | | | | 96.57 | 96.20 | | 8,887,681,527 | 38.55 |
| Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 6,474,285,493 | 5,404,031,950 | | | | 6,371,760,693 | 5,309,452,087 | | | | 98.42 | 98.25 | | 5,939,158,722 | 39.33 |
| Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | | | 174,288,493 | 154,031,550 | | | | 164,188,493 | 153,031,550 | | | | 94.21 | 99.35 | | 164,160,022 | 38.71 |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | 6,299,997,000 | 5,250,000,400 | | | | 6,207,572,200 | 5,156,420,537 | | | | 98.53 | 98.22 | | 5,774,998,700 | 39.35 |
| Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 3,956,126,711 | 1,940,918,900 | | | | 3,700,457,857 | 1,756,318,914 | | | | 93.54 | 90.49 | | 2,948,522,806 | 36.81 |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | 456,500,015 | 208,179,750 | | | | 434,809,965 | 170,035,290 | | | | 95.25 | 81.68 | | 332,339,883 | 35.39 |
| Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | 49,999,778 | 201,631,550 | | | | 0 | 201,184,050 | | | | 0.00 | 99.78 | | 125,815,664 | 19.96 |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | 837,545,687 | 465,249,600 | | | | 757,590,461 | 439,024,369 | | | | 90.45 | 94.36 | | 651,397,644 | 36.96 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | | | 149,998,264 | 42,688,250 | | | | 149,578,264 | 40,688,250 | | | | 99.72 | 95.31 | | 96,343,257 | 39.01 |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | 205,400,000 | 275,700,000 | | | | 199,578,500 | 266,485,660 | | | | 97.17 | 96.66 | | 240,550,000 | 38.76 |
| Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | 314,999,732 | 149,999,950 | | | | 269,637,732 | 53,043,000 | | | | 85.60 | 35.36 | | 232,499,841 | 24.19 |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | | 18,299,954 | 247,469,900 | | | | 10,256,005 | 236,474,395 | | | | 56.04 | 95.56 | | 132,884,927 | 30.32 |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | 1,923,383,281 | 349,999,900 | | | | 1,879,006,930 | 349,383,900 | | | | 97.69 | 99.82 | | 1,136,691,591 | 39.50 |

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa ke masa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa dimana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era cyber city, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan dijabarkan sebagai berikut, antara lain :

a. Dimensi Ekonomi

Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati

Purwakarta terpilih. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, diantaranya :

| Tujuan | Target | Rekomendasi | | Pengintegrasian Ke dalam Dokumen RPJMD |
|---|---|---|---|---|
| | | Program | Sasaran | |
| Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua | 7.b. Memperkuat Kerjasama dan mempromosikan investasi terkait infrastruktur dan teknologi dalam hal energi bersih | Program Perluasan Jaringan dan Upaya Pemanfaatan Sister City Promosi Secara Aktif Dalam Hal Investasi Infrastruktur dan Teknologi Energi Bersih | Peningkatan kerjasama dan pendanaan untuk infrastruktur dan teknologi dalam energi bersih | Sebagian rekomendasi telah diintegrasikan kedalam RPJMD dan/atau Renstra PD, dan sebagian lagi diintegrasikan dengan penyesuaian. |
| | 7.c. Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan | Program Perluasan Infrastruktur | Dana investasi untuk infrastruktur dan teknologi pelayanan energi | |
| Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses TIK dan internet untuk semua. | Program Perluasan Jaringan Akses Internet | Peningkatan penduduk yang memanfaatkan internet | |
| | | Program Pelatihan Penggunaan Internet | | |
| Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 17.8. Mengoperasionalkan Secara penuh bank Teknologi dan Mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan Penggunaan teknologi Yang memungkinkan, Khususnya teknologi Informasi dan komunikasi | Program Perluasan Jaringan Akses Internet Proporsi | individu yang menggunakan internet | |

Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terus meningkat dari 7,48%

ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 beranjak naik ke angka 3,42 persen. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2020 namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang dan maju. Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang. Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih belum optimal, meskipun program pemulihan ekonomi telah diprioritaskan namun belum mampu mendongkrak terhadap penurunan angka kemiskinan, terlebih kebijakan penentuan indikator penduduk miskin oleh Pemerintah Pusat diturunkan sampai pada desimal 1 sehingga menambah jumlah angka kemiskinan secara nasional dan daerah. Keadaan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya pengentasan penurunan angka kemiskinan secara komprehensif karena melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara maju dan modern; Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori B, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan- kelemahan yang belum teratasi dengan baik. Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah; Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 – 2021 dimana nilai IPM Kab. Purwakarta tahun 2021 mencapai 70,98 poin. Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan

tahun 2021 hanya mencapai angka 54,23 poin atau masih Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

2. Penguatan sosial ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui terobosan inovasi; Semenjak pandemi Covid-19 melanda berbagai daerah bahkan melanda diberbagai belahan daerah di dunia, sosial ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan mengakibatkan perekonomian daerah menurun secara signifikan, dan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta terus meningkat dari 7,48% ditahun 2019 menjadi 8,83% pada tahun 2021. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta tahun 2020 menurun sampai pada level -2,13 persen namun pada 2021 beranjak naik ke angka 3,42 persen. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2020 namun pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan daerah masih perlu terus ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat lebih berkembang dan maju. Dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat tersebut perlu dilakukan pengembangan strategi dan terobosan inovasi baik inovasi yang berbasis teknologi maupun inovasi dari sisi regulasi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia, baik dari sektor Koperasi dan UMKM, Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dinamikanya terus berkembang. Selain itu upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Purwakarta masih belum optimal, meskipun program pemulihan ekonomi telah diprioritaskan namun belum mampu mendongkrak terhadap penurunan angka kemiskinan, terlebih kebijakan penentuan indikator penduduk miskin oleh Pemerintah Pusat diturunkan sampai pada desil 1 sehingga menambah jumlah

angka kemiskinan secara nasional dan daerah. Keadaan ini tentu harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk terus melaksanakan program prioritas pembangunannya dalam upaya pengentasan penurunan angka kemiskinan secara komprehensif karena melibatkan berbagai sektor urusan pemerintahan.

3. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern; Dalam penerapan reformasi birokrasi di daerah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih harus di tingkatkan guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan kepada masyarakat baik secara efektif, efisien, mudah diakses, transparan dan akuntabel. Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai dengan kategori B, namun tentunya efektifitas pelaksanaannya mesti terus dioptimalkan agar pelayanan dan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kab. Purwakarta terus meningkat.

Aspek Pelayanan Umum

Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersedianya rencana induk (master plan) dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola IT di perangkat daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan layanan data informasi publik;
4. Masih kurangnya infrastruktur sarana komunikasi dan informasi;
5. Belum semua layanan publik berbasis SPBE yang terintegrasi.

Bidang Statistik

1. Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggungjawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistic sektoral;
3. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu;

4. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan;

Bidang Persandian

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian;
2. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
3. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness);
4. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah
- Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pencapaian Misi 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun ke depan. Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra Diskominfo Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

| KODE | VISI RPJPD 2005-2025 | MISI RPJPD 2005-2025 | TUJUAN RENSTRA | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | | TARGET KINERJA | | | KONDISI AKHIR | |
|--------------|---|---|--|-----------------|---|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|-------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" | | | | | | | | | | | | |
| V. | | Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | | | | | | | | | 0.00 | |
| V.1 | | | Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | - | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| V.1.1 | | | Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | - | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| V.1 | | | Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Info | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 2,37 | - | 2.6 | 2.8 | 3 | 8.4 | |
| | | | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | - | 84 | 97 | 98 | 99 | 294 | |
| | | | | | Cakupan pelayanan data statistik sectoral | Persen | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 280 | |
| | | | | | Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | 87 | 90 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| V.1.1 | | | Sasaran 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 2,37 | - | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 8.4 | |
| | | | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | - | 84.00 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 294.00 | |
| | | | | | Cakupan pelayanan data statistik sectoral | Persen | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 280.00 | |
| V.1.1 | | | Sasaran 3 : Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi/Kota.

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat | Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta | Faktor | |
|----|--|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK | Belum dijadikan kegiatan prioritas untuk peningkatan SDM dalam kompetensi dibidang TIK | Belum konsisten penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki | Tersedianya sarana pelatihan dan bimtek baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta |
| 2 | Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik | Belum terpenuhi kepatuhan terhadap Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi | Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang berkompetensi | Kebutuhan masyarakat dan PD terhadap layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan transparan |
| 3 | Terwujudnya Masyarakat berbasis TIK | Belum dilakukan secara optimal pemberdayaan masyarakat tentang TIK | Kurangnya komunitas masyarakat berbasis TIK | Tingginya antusias masyarakat mengenai TIK |
| 4 | Tersebaranya Informasi berbasis TIK | Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung tersebaranya informasi berbasis TIK | Kurangnya SDM yang berkompetensi | Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan informasi |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan. Rencana pengembangan transportasi dan perhubungan yang dilakukan untuk mendukung keberadaan PKN dan PKW di Jawa Barat yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, Arahan kebijakan RTRWP Jawa Barat dalam pengembangan infrastruktur energi dan telekomunikasi yang terkait dengan wilayah Kabupaten Purwakarta, diantaranya :

- Mengembangkan fasilitas telekomunikasi perdesaan. Dengan arahan pengembangan sebagai berikut :
 - Desa-desa yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah blank spot).
 - Desa-desa yang jaraknya jauh dari jaringan kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan teresterial telekomunikasi.
 - Desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi desa tersebut tergolong miskin.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penetapan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta serta berpengaruh dalam pengembangan

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang, Isu-isu strategis untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, diantaranya :

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Meningkatkan Keamanan Informasi.
3. Meningkatkan kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
4. Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta, visi dan misi yang sudah ditetapkan harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah berupa pernyataan tujuan organisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan **“Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah sasaran dengan merumuskan indikator kinerja.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau hasil oleh Perangkat Daerah melalui Tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran-sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah merumuskan sasaran- sasaran dan indikator keberhasilannya, pemicu agar semua unsur yang terdapat didalam organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sadar akan segala sesuatu yang harus dicapai. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran

yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta telah merumuskan sasaran-sasaran dan indikator keberhasilannya, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

| TUJUAN 1 | SASARAN 2 | INDIKATOR 3 | SATUAN 4 | TARGET KINERJA | | |
|---|--------------|---|-------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | 2024 5 | 2025 6 | 2026 7 |
| Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | | | | | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi | | | | | | |
| | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 2.6 | 2.8 | 3 |
| | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | 97 | 98 | 99 |
| | | Cakupan pelayanan data statistik sektoral | Persen | 90 | 95 | 95 |
| | | Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat | | | | | | |
| | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | 97.00 | 98.00 | 99.00 |
| | | Cakupan pelayanan data statistik sektoral | Persen | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | | Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (Tiga) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berikut tujuan, sasaran, strategi dan dan Kebijakan sesuai dengan RPD Kabupaten Purwakarta :

Tabel T.C-26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi | PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH | | |
|--|--|--|---|
| Misi 5 | Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Strategi 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1.1 Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah |
| Tujuan 2 : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi | Sasaran 2.1 : Meningkatnya Penyediaan Informasi Publik berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat | Strategi 1.2 : Meningkatkan Akses Komunikasi dan Informasi Publik Yang Mudah, Akurat dan Akuntabel | 1.2 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.3 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel |
| | | Strategi 1.3 : Meningkatkan Data Statistik Sektoral Yang Terkini dan Akuntabel | 1.4 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.5 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel |
| | Sasaran 3.1 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah | Strategi 1.4 : Meningkatkan Pengamanan Data dan Informasi | 1.6 Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital 1.7 Memperluas akses penyediaan data informasi publik yang akurat dan akuntabel |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu : **Misi 5 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat,** dengan program pembangunan sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | |
|--|---------|---------|---|--|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | V. | | | | | 27,385,482,106 | | 27,775,449,632 | | 28,297,933,875 | 0.00 | 83,458,865,613 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel | | V.1 | | | | | 9,330,482,106 | | 9,405,449,632 | | 9,462,933,875 | 0.00 | 28,198,865,613 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | 9,330,482,106 | BB | 9,405,449,632 | BB | 9,462,933,875 | BB | 28,198,865,613 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | | Baik | | Baik | | Baik | Baik | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | V.1.1 | | | | | | 9,330,482,106 | | 9,405,449,632 | | 9,462,933,875 | 0.00 | 28,198,865,613 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | | BB | | BB | | BB | | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | | Baik | | Baik | | Baik | | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | 9,330,482,106 | BB | 9,405,449,632 | BB | 9,462,933,875 | BB | 28,198,865,613 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-------------|---|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.16.01.201 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun | 9.00 | 9.00 | 145,000,000 | 9.00 | 145,000,000 | 9.00 | 155,000,000 | 9.00 | 445,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.202 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun | 7.00 | 7.00 | 2,760,870,925 | 7.00 | 2,768,370,925 | 7.00 | 2,775,870,925 | 7.00 | 8,305,112,775 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.203 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun | 9.00 | 9.00 | 35,000,000 | 9.00 | 40,000,000 | 9.00 | 45,000,000 | 9.00 | 120,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.204 | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 4.00 | 4.00 | 10,000,000 | 4.00 | 12,500,000 | 4.00 | 12,500,000 | 4.00 | 35,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.205 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 6.00 | 6.00 | 520,000,000 | 6.00 | 532,500,000 | 6.00 | 535,000,000 | 6.00 | 1,587,500,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.206 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan | 15.00 | 15.00 | 970,000,000 | 15.00 | 992,000,000 | 15.00 | 1,010,000,000 | 15.00 | 2,972,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.207 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan | 47.00 | 47.00 | 575,000,000 | 47.00 | 600,000,000 | 47.00 | 600,000,000 | 47.00 | 1,775,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--|---|-------------|--|---|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 2.16.01.208 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dibutuhkan | 40.00 | 40.00 | 3,989,611,181 | 40.00 | 3,990,078,707 | 40.00 | 3,989,562,950 | 40.00 | 11,969,252,838 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.01.209 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Perangkat Daerah yang dibutuhkan | 121.00 | 121.00 | 325,000,000 | 121.00 | 325,000,000 | 121.00 | 340,000,000 | 121.00 | 990,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| Tujuan : Meningkatkan Penyediaan Informasi Publik Yang Akurat dan Akuntabel berbasis Digital Serta Penyediaan Infrastruktur dan Penjaminan Keamanan Data dan Informasi | | V.1 | | | | | 18,055,000,000 | | 18,370,000,000 | | 18,835,000,000 | | 55,260,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.60 | 2.60 | 10,370,000,000 | 2.80 | 10,570,000,000 | 3.00 | 10,570,000,000 | 3 | 31,510,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 97.00 | 97.00 | 5,970,000,000 | 98.00 | 5,995,000,000 | 99.00 | 6,300,000,000 | 99.00 | 18,265,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Cakupan pelayanan data statistik sectoral | 90.00 | 90.00 | 675,000,000 | 95.00 | 735,000,000 | 95.00 | 800,000,000 | 95.00 | 2,210,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Presentase Jumlah Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | 100.00 | 100.00 | 1,040,000,000 | 100.00 | 1,070,000,000 | 100.00 | 1,165,000,000 | 100.00 | 3,275,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Infomasi Publik | V.1.1 | | | | | 17,015,000,000 | | 17,300,000,000 | | 17,670,000,000 | | 50,185,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---|---------|---|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | berbasis Digital yang Akurat dan Akuntabel Berbasis Digital dan Data Statistik Sektoral Yang Akurat | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.60 | 2.60 | | 2.80 | | 3.00 | | 3 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 97.00 | 97.00 | | 98.00 | | 99.00 | | 99.00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Cakupan pelayanan data statistik sektoral | 90.00 | 90.00 | | 95.00 | | 95.00 | | 95.00 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.02 | Program : Informasi Dan Komunikasi Publik | | | | 5,970,000,000 | | 5,995,000,000 | | 6,300,000,000 | | 16,465,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 95.00 | 95.00 | 820,000,000 | 97.00 | 820,000,000 | 99.00 | 950,000,000 | 99.00 | 2,290,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 95.00 | 95.00 | 3,050,000,000 | 97.00 | 3,075,000,000 | 99.00 | 3,100,000,000 | 99.00 | 9,225,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | 95.00 | 95.00 | 600,000,000 | 97.00 | 600,000,000 | 99.00 | 600,000,000 | 99.00 | 1,800,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-------------|---|--|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100.00 | 100.00 | 1,050,000,000 | 100.00 | 1,050,000,000 | 100.00 | 1,100,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 100.00 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | 95.00 | 95.00 | 350,000,000 | 97.00 | 350,000,000 | 99.00 | 350,000,000 | 99.00 | 1,050,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.02.201 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Tertangani | 9.00 | 11.00 | 5,970,000,000 | 11.00 | 5,995,000,000 | 11.00 | 6,300,000,000 | 11.00 | 18,265,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.16.03 | Program : Aplikasi Informatika | | | | 10,370,000,000 | | 10,570,000,000 | | 10,570,000,000 | | 31,510,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100.00 | 100.00 | 5,000,000,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | 100.00 | 15,000,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | 100.00 | 100.00 | 5,370,000,000 | 100.00 | 5,570,000,000 | 100.00 | 5,570,000,000 | 100.00 | 16,510,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|-------------|---|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | 2.16.03.201 | Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah | 3.00 | 3.00 | 5,250,000,000 | 3.00 | 5,250,000,000 | 3.00 | 5,250,000,000 | 3.00 | 15,810,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta | | |
| | | 2.16.03.202 | Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Aplikasi yang dibangun/ dikembangkan | 12.00 | 12.00 | 5,120,000,000 | 12.00 | 5,320,000,000 | 12.00 | 5,320,000,000 | 12.00 | 15,700,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta | | |
| | | 2.20.02 | Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | 675,000,000 | | 735,000,000 | | 800,000,000 | | 2,210,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta | | |
| | | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 85.00 | 85.00 | 100,000,000 | 90.00 | 100,000,000 | 95.00 | 100,000,000 | 95.00 | 100,000,000 | 95.00 | 300,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 85.00 | 85.00 | 100,000,000 | 90.00 | 100,000,000 | 95.00 | 100,000,000 | 95.00 | 100,000,000 | 95.00 | 300,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|--|-------------|--|---|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada | Ada | 200,000,000 | Ada | 250,000,000 | Ada | 300,000,000 | Ada | 750,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | 100,000,000 | Ada | 100,000,000 | Ada | 100,000,000 | Ada | 300,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Buku "PDRB" | Tidak | Tidak | - | Tidak | - | Tidak | - | Tidak | - | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | 85.00 | 85.00 | 175,000,000 | 90.00 | 185,000,000 | 95.00 | 200,000,000 | 95.00 | 560,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.20.02.201 | Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan Data Statistik | 6.00 | 6.00 | 675,000,000 | 6.00 | 735,000,000 | 6.00 | 800,000,000 | 6.00 | 2,210,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | Sasaran : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah | V.1.1 | | | | | 1,040,000,000 | | 1,070,000,000 | | 1,165,000,000 | | 3,275,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Presentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | 100.00 | 100.00 | 1,040,000,000 | 100.00 | 1,070,000,000 | 100.00 | 1,165,000,000 | 100.00 | 3,275,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.21.02 | Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | | 1,040,000,000 | | 1,070,000,000 | | 1,165,000,000 | | 3,275,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 30.00 | 30.00 | 600,000,000 | 30.00 | 600,000,000 | 30.00 | 625,000,000 | 30.00 | 1,875,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|-------------|---|--|--|---|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--|---------------|--|----------------------|
| | | | | | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 100.00 | 100.00 | 310,000,000 | 100.00 | 320,000,000 | 100.00 | 370,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | | | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | 10.00 | 10.00 | 130,000,000 | 20.00 | 150,000,000 | 50.00 | 170,000,000 | 50.00 | 400,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.21.02.201 | Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah | 4.00 | 4.00 | 930,000,000 | 4.00 | 950,000,000 | 4.00 | 1,015,000,000 | 4.00 | 2,895,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |
| | | 2.21.02.202 | Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jaring Komunikasi Sandi pada Perangkat Daerah | 56.00 | 56.00 | 110,000,000 | 56.00 | 120,000,000 | 56.00 | 150,000,000 | 56.00 | 380,000,000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kabupaten Purwakarta |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta adalah ketersediaan Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur capaian target kinerja atau keberhasilan kinerja pembangunan daerah yang pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kabupaten Purwakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | Indikator Sasaran 1 : | | | | | |
| 1 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | BB | BB | BB |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| | Indikator Program : | | | | | |
| 3 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | BB | BB | BB |
| | Indikator Sasaran 2 : | | | | | |
| 4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3 |
| 5 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | 97.00 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 99.00 |
| 6 | Cakupan pelayanan data statistik sectoral | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Indikator Program : | | | | | |
| 7 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 |

| NO | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 |
| 9 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 |
| 10 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 |
| 13 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
| 16 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
| 17 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

| NO | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 19 | Buku "PDRB" | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 20 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
| | Indikator Sasaran 3 : | | | | | |
| 21 | Persentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Indikator Program : | | | | | |
| 22 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 23 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 |

Tabel 7.2.
Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

| NO | INDIKATOR | SATUAN | RUMUS / SUMBER DATA |
|----|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat |
| 4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Poin | Nilai Hasil Indeks SPBE |
| 5 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | Persen | Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik |
| 6 | Cakupan pelayanan data statistik sektoral | Persen | $\frac{\text{Data Statistik Sektoral Yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Data Statistik Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$ |
| 7 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Persen | $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ |
| 8 | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Persen | $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ |
| 9 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Persen | $\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$ |
| 10 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$ |
| 11 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Persen | $\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$ |
| 12 | Tingkat akses layanan informasi publik oleh masyarakat | Persen | $\frac{\text{Jumlah akses layanan informasi publik oleh masyarakat tahun n - tahun lalu}}{\text{Jumlah akses layanan informasi publik oleh masyarakat tahun lalu}} \times 100\%$ |
| 13 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | $\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ |
| 14 | Persentase aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif | Persen | $\frac{\text{Jumlah aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aktif}}{\text{Jumlah aplikasi/sistem pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$ |
| 15 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ |
| 16 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ |
| 17 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/tidak | Ada/tidak sistem data dan statistik yang terintegrasi |
| 18 | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada/tidak | Ada/tidak Buku "kabupaten dalam angka" |
| 19 | Buku "PDRB" | Ada/tidak | Ada/tidak Buku "PDRB" |
| 20 | Persentase ketersediaan data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan | Persen | $\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral tiap bidang urusan pemerintahan yang tersedia}}{\text{Jumlah bidang urusan pemerintahan}} \times 100\%$ |
| 21 | Persentase Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan | Persen | $\frac{\text{Jumlah Layanan Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah yang Teramankan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | RUMUS / SUMBER DATA |
|----|--|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ |
| 23 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$ |
| 24 | Persentase pengamanan data aplikasi/sistem pemerintah daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah data aplikasi/sistem pemerintah daerah yang aman dari kebocoran data}}{\text{Jumlah data aplikasi/sistem pemerintah daerah keseluruhan}} \times 100\%$ |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari dokumen yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026.

Visi Kabupaten Purwakarta dalam RPD Tahun 2024 - 2026, yaitu : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 ini disusun. Sernoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Demikian Pancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

Purwakarta, 28 April 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA



RUDI HARTONO, S.A.P., M.M.
NIP. 19701023 199203 1 007